

## ABSTRACT

Conservation area is a special area consisting of land, sea and air that is protected for all natural wealth is to maintain the balance of natural ecosystems. Balai Taman Nasional (BTN) are national institution in Indonesia that had responsibilities for conservation task. Carrying out its task, BTN were obliged to pay attention to the welfare of the communities surrounding conservation areas, especially communities that depend on forest products to meet their needs. As efforts to encourage the condition of community around the area, in 2006 the Ministry of Forestry launch Model Desa Konservasi (MDK) programs that set as national program through the Strategic Plan of the Ministry of Forestry in 2005-2009. In 2011, Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) runs the MDK program that takes place in Dusun Turgo, Sleman, Yogyakarta. MDK Turgo itself judged to fail, either in terms of implementation or achievement of objectives. This research seeks to find out the cause of the failure through an analysis of the implementation of the basic principles of MDK, consisting of (1) participatory (2) democratic, (3) transparent (4) integrative, (5) accountable (6) continuous, (7) independence, (8) conservation. This research method using qualitative type. Data collected by using in-depth interview against the Chairman, members, officers of the companion as well as parties involved in MDK Turgo program. The data also supported by of observation and documentation technique as supporting data. The research results show that the failure of the implementation of the principle of development in MDK Turgo is caused due to the lack of accompaniment and intensive communication between the officer's of BTNGM with group as the recipient of the program. Where the absence of complete information, a sense of trust and lack of participation makes the implementation of the principle is not achieved.

Keywords: Model Desa Konservasi, Empowerment, Conservation.

## INTISARI

Kawasan konservasi adalah wilayah khusus baik darat, laut maupun udara yang dilindungi segala kekayaan alamnya demi menjaga keseimbangan ekosistem alam. Balai Taman Nasional (BTN) sendiri merupakan Unit Pelaksana Tugas dalam pelaksanaan tugas konservasi. Dalam melaksanakan tugasnya, BTN diwajibkan untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi, terutama masyarakat yang bergantung kepada hasil hutan dalam memenuhi kebutuhannya. Sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan, pada tahun 2006 Kementerian Kehutanan menetapkan program Model Desa Konservasi (MDK) sebagai program nasional melalui Rencana Strategis Kementerian Kehutanan tahun 2005-2009. Pada tahun 2011, Balai Taman Nasional Gunung Merapi menjalankan MDK di Dusun Turgo. MDK di Turgo sendiri dinilai gagal, baik dalam hal pelaksanaan maupun pencapaian tujuan. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui penyebab gagalnya pelaksanaan MDK Turgo melalui analisis terhadap pelaksanaan prinsip dasar MDK yang terdiri dari (1) partisipatif, (2) demokratis, (3) transparan, (4) integratif, (5) akuntabel, (6) berkesinambungan, (7) mandiri, (8) konservasi. Metode penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam terhadap ketua, anggota, petugas pendamping serta pihak yang terlibat dalam program MDK Turgo. Digunakan pula teknik observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan pelaksanaan prinsip pembangunan di MDK Turgo disebabkan karena tidak adanya pendampingan serta komunikasi yang intensif antara petugas pendamping MDK dengan kelompok sebagai penerima program. Hal tersebut mempengaruhi pelaksanaan prinsip pembangunan MDK, dimana tidak adanya informasi yang lengkap, rasa percaya dan minimnya partisipasi membuat pelaksanaan prinsip MDK tidak tercapai.

Kata kunci : Model Desa Konservasi, Pemberdayaan, Konservasi.